



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

INSPEKTORAT

Jl. RA. Basuni 19 C, Mojokerto, Jawa Timur
Telp. (0321) 329188 – 321959 Fax. (0321) 329188
Website : www.inspektorat.mojokertokab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022

Nomor : 705 / 2404 / 416-060 / 2022
Tanggal : 6 September 2022
Lampiran : -

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tim telah melakukan Evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dan diperoleh Nilai AKIP dengan Predikat **A** dengan nilai **80,48**.
2. Tujuan dilaksanakannya Evaluasi Akuntabilitas Internal adalah:
 - a. Memperoleh informasi tentang Implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (Empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi;

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;

4. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (<i>reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	> 80 – 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.
3.	BB	> 70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ Koordinator.
4.	B	> 60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/ unit kerja.
5.	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	> 30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem

			manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perhatian/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

5. Pencapaian predikat A, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dievaluasi pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30,00	23,08
b. Pengukuran Kinerja	30,00	21,00
c. Pelaporan Kinerja	15,00	13,90
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	22,50
Jumlah	100,00	80,48

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja yang meliputi keselarasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dengan kinerja yang ingin dicapai. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **23,08** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

1) Sub Komponen Keberadaan

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto telah memiliki dokumen SOP Perencanaan Kinerja, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Aksi, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan dan disetujui oleh Kepala Dinas.

2) Sub Komponen Kualitas

Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*). Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja telah memuat sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja. namun belum seluruhnya indikator kinerja yang tercantum sesuai dengan kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound goals*).

3) Sub Komponen Implementasi

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto menggunakan dokumen Renstra sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran. Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya, namun Dokumen Renstra belum direviu secara berkala dan pemantauan tersebut belum didokumentasikan secara lengkap dalam Laporan.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja, serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **21,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a) Sub Komponen Keberadaan

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto telah memiliki SOP Perencanaan Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja yang dapat diandalkan. Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja, pengukuran indikator kinerja dan mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja.

b) Sub Komponen Kualitas

Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien. Namun data kinerja yang dikumpulkan belum relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan dan belum didokumentasikan secara lengkap dalam Laporan.

c) Sub Komponen Implementasi

Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment. Penyesuaian strategis dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien juga telah dilakukan, namun belum didukung dengan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan dan dokumentasi tindak lanjut hasil pengukuran kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **13,90** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a) Sub Komponen Keberadaan

Dokumen Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto tahun 2021 telah disusun, diformalkan, direviu, dan dipublikasikan.

b) Sub Komponen Kualitas

Dokumen Laporan Kinerja belum memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya. Sebab dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja).

c) Sub Komponen Implementasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial telah menjadi dasar penyesuaian strategi/kebijakan yang akan dilaksanakan pimpinan untuk mencapai target kinerja yang akan datang. Namun karena informasi yang tersaji dalam LKjIP Dinas Sosial belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas menyebabkan strategi/kebijakan yang dibuat masih terfokus pada sisi anggaran saja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas pelaksanaan evaluasi kinerja oleh internal Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mencakup penilaian atas pemenuhan evaluasi kinerja internal, kualitas pelaksanaan, dan pemanfaatan atas evaluasi kinerja internal

tersebut, serta pemenuhan atas rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP tahun 2021. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **22,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a) Sub Komponen Keberadaan

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto telah membuat pedoman teknis evaluasi AKIP internal yang di formalkan oleh Kepala Dinas. Namun masih belum sepenuhnya dilaksanakan pada seluruh unit secara rutin.

b) Sub Komponen Kualitas

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) beserta bukti pendukung dan hasil evaluasi pada seluruh unit kerja belum disajikan secara lengkap tetapi terdapat upaya aktif untuk melengkapi bukti pendukung

c) Sub Komponen Implementasi

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi evaluasi AKIP oleh Inspektorat namun belum terdapat langkah nyata pemantauan renaksi setiap bulan serta melakukan perbaikan atau perubahan strategi jika renaksi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan didokumentasikan secara lengkap dalam Laporan.

6. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat direkomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial untuk ditindaklanjuti sebagai berikut :
- a. Menentukan indikator kinerja sesuai dengan kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound goals*);
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian rencana aksi dan pencapaian kinerja secara berkala dan hasil berupa rekomendasi diwujudkan dalam tindakan/aksi/langkah yang nyata;
 - c. Melakukan pengukuran capaian kinerja dan didokumentasikan secara lengkap dalam Laporan;
 - d. Mendokumentasikan secara lengkap dalam laporan pelaksanaan program dan kegiatan tindak lanjut hasil pengukuran kinerja;

- e. Menambahkan perbandingan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*) pada Dokumen Laporan Kinerja;
- f. Menyajikan informasi realisasi kinerja yang telah dicapai pada LKjIP serta menyusun strategi/kebijakan yang tidak hanya fokus pada sisi anggaran saja akan tetapi juga kinerja dan efisiensi;
- g. Melaksanakan pedoman teknis evaluasi AKIP internal secara rutin dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.
- h. Melaksanakan pemantauan renaksi setiap bulan serta melakukan perbaikan atau perubahan strategi jika renaksi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan didokumentasikan secara lengkap dalam Laporan.

Demikian laporan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah.

Mengetahui,
INSPEKTUR
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. POEDJI WIDODO
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700425 199003 1 006

Tim Evaluator :

- 1. ANGGIE SARIBHANON, SE., M.Si :
- 2. SULIS MASLIKHATIN, S.H :
- 3. ANITA WURYANSARI, S.E :
- 4. HENY DEWI RATNASARI, S.A :
- 5. RINA PUSPITA WAHYUNINGAJI., ST :



Balai
Sertifikasi
Elektronik